

## Grace Ngaku Dapat Tugas Pemerintahan dari Jokowi

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natali, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5). "Ada pertemuan aja. Pertemuan dengan bapak presiden," kata Grace kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5). Dalam pertemuan tersebut, Grace menyebut juga ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Grace menyebut bahwa dirinya mendapat

penugasan dari Jokowi. "Soal penugasan dari Beliau (Jokowi)," kata Grace. Saat dikonfirmasi tugas apa yang bakal diembannya nanti, Grace tak menjelaskan secara rinci. Dirinya hanya menyebut tugas di dalam pemerintahan. "Di pemerintahan," kata Grace. Meski begitu, Grace belum mau membicarakan lebih lanjut penugasan di pemerintahan seperti apa yang diminta Jokowi. "Ya nanti diinformasikan deh, biar koordinasi dulu," kata Grace. ● me

## LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 7.700 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2023. Anggota LPSK periode 2024-2029, Antonius P S Wibowo menjelaskan bahwa jumlah permohonan tersebut meningkat pesat dibandingkan tahun 2019-2020 di kisaran 2.500.

"Tahun lalu sekitar 7.700 mendekati 8.000. sedangkan kalau dibandingkan ketika kita mulai awal bertugas tahun 2019-2020 masih sekitar 2.500," kata Antonius usai acara pembacaan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).

Ia tidak memungkiri, banyaknya jumlah permohonan yang masuk menggambarkan ekspektasi tinggi masyarakat terhadap lembaga itu. Ekspektasi tersebut, harus diikuti dengan penguatan organisasi baik di bidang sumber daya manusia, anggaran, maupun jejaring. Tiga hal itu menjadi fokus tujuh anggota LPSK yang baru saja dilantik hari ini. "Kita akan memperkuat jejaring dengan semua stakeholder baik itu anggota dewan, pemerintah media massa organisasi publik, dan sebagainya," jelas Antonius.

Di sisi lain, pihaknya akan

memperkuat penggunaan teknologi informasi. "Itu akan kita optimalkan dalam rangka tentu saja mendukung permohonan perlindungan dan mendukung pelaksanaan perlindungan saksi dan korban," katanya.

Sebagai informasi, tujuh orang anggota resmi menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (15/5). Ketujuh anggota itu sah menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan 2024-2029 usai mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini tertuang pula dalam Keputusan Presiden Nomor 52 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024. Usai pembacaan keputusan, ketujuh anggota membacakan pernyataan sumpah jabatan. ● han

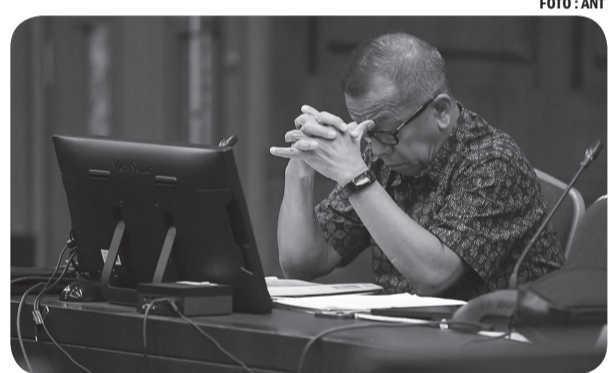


FOTO: ANI

### SIDANG LANJUTAN EMIRSYAH SATAR

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (15/5). Sidang mantan Dirut Garuda Indonesia itu beragenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan atau a de charge.

## Caleg Terpilih Wajib Mundur Jika Maju dalam Pilkada 2024

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akhirnya meralat pernyataan sebelumnya. Kini ia calon legislatif (Caleg) terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri jika maju dalam kontestasi Pilkada pada November mendatang.

Hal ini disampaikan Hasyim saat memaparkan rancangan PKPU tentang Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil wali kota dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Hasyim menjelaskan, dalam UU pilkada menentukan bahwa jika ada anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kab/kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri jabatannya. Sementara, bagi calon terpilih yang belum dilantik maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR DPD atau DPRD meskipun belum dilantik.

"Jadi kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. Maka apabila yang bersangkutan didaftarkan parpol sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka

yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri," paparannya.

Syarat atau dokumen ini paling lambat diserahkan 5 hari setelah penetapan pasangan calon, berupa surat pengajuan diri sebagai anggota DPR DPD dan DPRD terpilih. Kemudian yang kedua adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut.

"Kemudian yang ketiga surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasyim memberikan simulasi. Jika di dalam tahapan pilkada, pendaftaran calon itu dilaksanakan tanggal 27-29 Agustus tahun 2024, lalu dilakukan penelitian administrasi verifikasi dan kemudian pada akhirnya ditetapkan sebagai paslon peserta pilkada itu pada tanggal 22 September 2024.

Untuk anggota DPR DPD sebagaimana diketahui, bagi yang terpilih akan dilantik 1 Oktober 2024. Sehingga, begitu yang bersangkutan ditetapkan oleh KPU Provinsi atau kabupaten/kota sebagai calon atau paslon peserta Pilkada 2024, maka yang bersangkutan harus segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih. ● han

# 2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



## KUNJUNGAN KERJA PANGLIMA TNI DI PALU

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri) didampingi Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya (ketiga kiri) dan Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Dody Triwinarto (kiri) disambut sejumlah prajurit di Lapangan Korem 132 Tadulako di Palu, Sulteng, Rabu (15/5). Kunjungan Panglima TNI ini dalam rangka meresmikan selesainya rehabilitasi gedung Markas Korem 132 Tadulako dan renovasi Masjid Al-Aqsha di kawasan tersebut.

## DATA PEMILIH 2023 BOCOR

# Ketua KPU Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP, Terbukti Langgar Kode Etik

Semua komisioner KPU disebut melanggar kode etik atas kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi akhir tahun 2023 oleh hacker Jimbo.

JAKARTA (IM) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu I. Hasyim Asy'ari dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu.

Pelanggaran kode etik dan pedoman yang dimaksud terkait dengan dugaan kebocoran data pemilih pada Sidalah atau Sistem Informasi Data Pemilih KPU RI pada tahun 2023.

Selain Hasyim Asy'ari, enam komisioner KPU lain-

nya juga dijatuhi sanksi yang sama sebagai teradu II-VII, yakni Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Keputusan itu dibacakan DKPP terkait dengan perkara nomor 4-PKE-DKPP/1/2024 yang diajukan oleh Rico Nurfrianyah Ali.

"Memutuskan, mengabdikan pengaduan pengaduan tentang. Mejatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I-VII," kata Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam sidang yang digelar, Selasa

(14/5).

Dalam pertimbangannya, anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, para teradu seharusnya menindaklanjuti dugaan kebocoran data pemilih dengan memedomani ketentuan Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, menurut dia, para teradu seharusnya melakukan pemberitahuan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban publik. Hal tersebut sejalan dengan prinsip jujur, kepastian hukum, tertib, terbuka, dan akuntabel selaku penyelenggara pemilu.

"Dalih teradu bahwa dugaan kebocoran data pemilih belum dapat dibuktikan karena pihak Bareskrim masih melakukan tahapan penyelidikan, tidak dibenarkan

menurut etika penyelenggara pemilu," kata Dewa Kade saat membacakan pertimbangan putusan.

Oleh karenanya, para teradu dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf d, Pasal 6 ayat 3 huruf d, Pasal 9 huruf a, Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf c, Pasal 16 huruf b dan huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Baca juga: Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih.

Sebagaimana diketahui, Ketua dan Anggota KPU RI yakni Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz diajukan ke DKPP.

Semua komisioner KPU itu disebut telah melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu dalam dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi akhir tahun 2023 oleh hacker Jimbo.

Dugaan pelanggaran kode etik ini diajukan oleh Rico Nurfrianyah Ali dan terdaftar dengan nomor perkara 4-PKE-DKPP/1/2024. Dalam tuntutanannya, Rico meminta DKPP menetapkan para teradu sebagai pelanggaran etik dan memberikan sanksi pemberhentian. Sebab, terbukti melanggar kode etik karena data DPT harusnya dilindungi oleh KPU RI.

Selain itu, semua komisioner KPU juga disebut melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 46 ayat 1. ● han

## KPK Banding atas Vonis 6 Tahun Penjara Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Hasan

JAKARTA (IM) - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya secara resmi menyatakan banding atas vonis enam tahun penjara Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan. Tim Jaksa telah menyerahkan memori banding tersebut ke Pengadilan.

"Tim jaksa telah selesai menyatakan upaya hukum banding dan juga menyerahkan memori banding dalam perkara terdakwa Hasbi Hasan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (15/5).

Ali menjelaskan pertambahan tim jaksa mengajukan upaya hukum banding. Sebab, tim Jaksa merasa putusan

Pengadilan di tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum sesuai dengan tuntutan.

"Terkait alasan banding diantaranya karena belum terpenuhinya sisi rasa keadilan untuk amar pidana badan sebagaimana putusan tingkat pertama sehingga Tim Jaksa berharap ditingkat kedua yaitu Pengadilan Tinggi dapat memutus sesuai dengan surat tuntutan," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan terhadap Hasbi Hasan.

Hasbi Hasan dinyatakan terbukti secara sah dan meya-

kinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, Hasbi Hasan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar yang dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap.

Vonis tersebut diketahui jauh dari tuntutan yang diajukan tim jaksa. Di mana sebelumnya, tim Jaksa menuntut agar Hasbi Hasan dipidana selama 13 tahun dan delapan bulan penjara.

Selain itu, tim Jaksa juga menuntut agar Hasbi Hasan diwajibkan membayar denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp3,88 miliar. ● me

## Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Jabatan 7 Anggota LPSK

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah jabatan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029, di Istana Negara, Rabu (15/5).

Pengucapan sumpah jabatan tersebut digelar setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketujuh orang calon yang mengucapkan sumpah jabatannya ialah Anton PS Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fachrudin, Mahyudin, Brigjen Pol Purn Achmadi dan Sri Nurherwati.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini, langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata 7 ang-

gota LPSK membacakan sumpah.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian. Demi Allah saya bersumpah, akan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan. Demi Allah saya bersumpah, akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya," ujarnya.

Turut hadir dalam pengucapan sumpah tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua KY Amzulian Rifai, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Ketua BPK Isma Yatim, Inspektur Jenderal TNI Laksdyda Dadi Hartanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. ● me



FOTO: ANI

### RAKER PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kedua kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5). Raker yang diikuti Bawaslu, KPU, DKPP serta Mendagri tersebut mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 serta persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024.

### PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan dalam dan Pasal 125 ayat (7) dan Pasal 127 ayat (8) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan rencana PT Nestlé Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia untuk mengambil alih seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh PT Wyeth Nutrition Sduenan, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dimiliki oleh Wyeth (Hong Kong) Holding Company Limited, berkedudukan di Kowloon, Hong Kong, yang merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang diumumkan dan disetor dalam Perseroan.

Dengan ini diumumkan kepada semua pihak yang berkepentingan dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

PT Wyeth Nutrition Sduenan  
Arkadia Green Park Tower G Lantai 11, Jl. TB. Simulupang Kav. 88,  
Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Jakarta, 16 Mei 2024

PT Wyeth Nutrition Sduenan Direksi PT Nestlé Indonesia Direksi